

KERTAS DATA AUDIT

Unit Kerja : ftif

Sasaran : Pengelolaan Keuangan

Masa Audit : Januari 2019

Bulan Audit : Februari 2019

Auditor : auditor\$

Kode Temuan 1.04 : Ketidapatuhan terhadap Peraturan : administrasi

Deskripsi Masalah : Pertanggungjawaban pembayaran/ pembelian barang/jasa tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)

Uraian

a. Kondisi:

- Hasil audit dokumen SPJ diketahui bahwa pengelolaan administrasi keuangan bulan Januari tahun 2019 di Unit Kerja : ftif belum sepenuhnya tertib, antara lain:

1. Kelengkapan berkas SPJ

No	Kelengkapan	Keterangan		
		Ada / Tidak ada	Jumlah	Nominal
1	Rekap Per Mak	item1\$	item1_jum\$	item1_nom\$
2	Rekap SPJ (urut)	item2\$	item2_jum\$	item2_nom\$
3	Kwitansi di Rekap SPJ	item3\$	item3_jum\$	item3_nom\$
4	Fisik kwitansi yang ada	item4\$	item4_jum\$	item4_nom\$
5	Kwitansi yang ada temuan	item5\$	item5_jum\$	item5_nom\$
6	BA Serah Terima UMK	item6\$	item6_jum\$	item6_nom\$
7	BA Rekonsiliasi	item7\$	item7_jum\$	item7_nom\$
8	Transaksi Jurnal	item8\$	item8_jum\$	item8_nom\$
9	Bukti Setor Saldo	item9\$	item9_jum\$	item9_nom\$

2. Ketidapatuhan terhadap aturan yang berlaku

Kwitansi	nominal	keterangan
23	99	januari

- Hasil audit dokumen SPJ diketahui bahwa pengelolaan administrasi keuangan tahun 2019 yang dilaksanakan BPP di Unit Kerja : ftif yang belum ditindaklanjuti, antara lain:

b. Kriteria

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, Pasal 65 ayat (1): "**Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh bayaran**".
2. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2018 tentang **Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember**.
3. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 tahun 2018 tentang **Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2018**.

c. Kesimpulan

Pengelolaan administrasi di Unit Kerja : ftif belum tertib karena kurangnya pengendalian internal pimpinan Unit Kerja, kekurangcermatan dan belum optimal BPP dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan lemahnya pengawasan PPK terkait, sehingga menyebabkan tertib administrasi keuangan tidak tercapai.

d. Rekomendasi

Pimpinan Unit Kerja menginstruksikan BPP terkait untuk segera melengkapi bukti pertanggungjawaban pembayaran/pembelian barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.

e. Tanggapan

(Bisa disampaikan dalam kertas terpisah dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja Terkait)

Surabaya, 12 Februari 2019

Menyetujui

Ka Unit Audit internal Bidang Keuangan,

Auditan,

Ir. Tony Bambang M.,PGDip

.....